



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**DINAS PERINDUSTRIANDAN TENAGA
KERJA KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

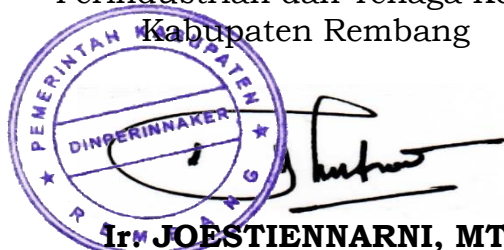
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada sernua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026.

Rembang, 03 Januari 2022

Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rembang



Ir. JOESTIENNARNI, MT

NIP. 19620922 1990032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2. Struktur Organisasi	13
2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Ketenagakerjaan, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	23
3.4. Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	24
3.5. Telaah Renstra Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.....	29
3.6. Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	30
3.7. Penentuan Isu-isu strategis	32

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.6.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Urusan Industri dan Perdagangan Tahun 2019-2023	32
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinperinnaker Kabupaten Rembang	35
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinperinnaker	37
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026	39
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja DINPERINNAKER Kab. Rembang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ..	51
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) DINPERINNAKER Kab. Rembang Tahun 2021 – 2026	52
Tabel 7.3.	Formulasi/Rumusan Perhitungan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DINPERINNAKER Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.....	53
Tabel 7.4.	Formulasi/Rumusan Perhitungan Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) DINPERINNAKER Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	14
-------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi.

Seiring dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021-2026, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu periode jangka menengah, yaitu tahun 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra juga dijadikan sebagai pedoman, arah, dan gambaran keberhasilan pembangunan di bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026 memuat berbagai program pembangunan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang akan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau dimungkinkan akan terjadi untuk kurun waktu tahun 2021-2026, dengan penekanan pada pencapaian sasaran misi Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu “Rembang Maju, Mandiri, dan

Sejahtera untuk mewujudkan Visi “Rembang Gemilang 2026” dengan mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi, mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial, membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4445);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 2/MEN/II/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
 15. Peraturan Menteri Perindustrian No. 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 –2019;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor9);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rembang 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan fokus pada tahun 2021- 2026 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
2. Memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinperinnaker Kabupaten Rembang;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
4. Sebagai dasar dalam pengukuran pencapaian kinerja atas dasar indikator yang telah ditetapkan dalam renstra;
5. Sebagai referensi bagi seluruh *stakeholders* untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, baik melalui partisipasi aktif dalam pelaksanaan maupun melalui pengawasan atas kinerja dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2022 meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKATDAERAH
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial dan jaminan sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan

- industrial dan jaminan sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
 - 6) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
 - 7) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas

- Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - 4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dilingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - 6) pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- c. Tugas Sub Bagian Program adalah melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang
- d. program di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- e. Tugas Sub Bagian Keuangan adalah melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

f. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

a. Tugas Pokok

Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembangunan sumber daya industri.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan sumber daya industri;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan sumber daya industri;
- 3) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan sumber daya industri;
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri

a. Tugas Pokok

Kepala Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengendalian dan sistem informasi industri yang terdiri dari inovasi dan pengendalian industri serta pengelolaan data dan informasi industri.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian dan sistem informasi industri;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang inovasi dan pengendalian industri serta pengelolaan data dan informasi industri untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan inovasi dan pengendalian industri serta pengelolaan data dan informasi industri;
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

a. Tugas Pokok

Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mempunyai

tugas pokok perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja;
- 3) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja;
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

a. Tugas Pokok

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - 3) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
7. UPTD melaksanakan tugas teknik operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbag Program;
 - b) Subbag Keuangan;
 - c) Subbag Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
4. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri
5. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
6. Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial
7. UPTD
8. Kelompok jabatan fungsional.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
 REMBANG



Gambar 2.1

**Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Rembang**

Sumber: Peraturan Bupati Rembang No. 72 Tahun 2021

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Aparatur merupakan elemen strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat multi dimensi dan kompleks, maka diperlukan adanya aparatur yang memiliki kemampuan pemahaman wawasan tugas yang luas serta kemampuan untuk melaksanakan secara baik.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang memiliki sumber daya perangkat Daerah sebagai berikut;

A. Pegawai menurut status

- 1) PNS : 37 orang
- 2) CPNS : 2 orang
- 3) Kontrak : 1 orang
- 4) Harian lepas : 15 orang

B. Jenis Kelamin

- 1) Pria : 16 orang
- 2) Wanita : 21 orang

C. Pendidikan Formal

- 1) S3 : -
- 2) S2 : 10 orang
- 3) S1 : 27 orang
- 4) D3 : 7 orang
- 5) SMA : 9 orang

D. Golongan/Pangkat

- 1) Gol IV : 7 orang
- 2) Gol III : 30 orang
- 3) Gol II : orang
- 4) Gol I : orang
- 5) Non Gol/ Kontrak : 1 orang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan Perindustrian, beberapa hal yang masih menjadi tantangan sebagai berikut;

1. Aspek Sumber Daya

Pemanfaatan SDA lokal masih belum optimal dimanfaatkan para pelaku usaha.

Sebagian dari mereka masih mendatangkan bahan baku industri dari luar daerah. Karena harus didatangkan dari luar daerah, faktor transportasi sangat kuat berpengaruh sehingga jarak dan fluktuasi harga BBM akan sangat berdampak pada kelangsungan usaha mereka.

2. Aspek Teknologi

a) Lemahnya penguasaan teknologi dapat menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan, dimana kualitas produk biasanya rendah dan secara kuantitas jumlahnya sedikit dibanding penggunaan teknologi tinggi dalam proses produksi. Hal ini berdampak pada harga jual produk yang tinggi.

b) Belum berpadunya pengembangan iptek dilembaga-lembaga penelitian yang tersebar

diberbagai instansi dengan dunia industri. Banyak hasil penelitian yang belum termanfaatkan secara praktis, sehingga perlu upaya penerapan hasil rekayasa teknologi industri serta sosialisasi tentang penggunaan teknologi modern dibidang industri.

3. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya

- a) Liberalisasi perdagangan merupakan tantangan yang harus dihadapi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, terutama dari sisi kualitas produksi dan harga yang lebih kompetitif dibanding.
- b) Banyak pelaku usaha mikro yang belum familiar dengan pihak perbankan (belum bankable).
- c) Menjamurnya toko modern di Kabupaten Rembang yang berdampak pada menurunnya minat masyarakat berbelanja dipasar tradisional yang seringkali kurang nyaman kondisinya. Upaya untuk meningkatkan keberadaan pasar tradisional sebagai tempat berbelanja yang nyaman dan representatif sangat diperlukan mengingat toko modern menyajikan tempat berbelanja yang lebih nyaman dan efisien.

Peluang pengembangan pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 meliputi:

1. Aspek Kebijakan Pemerintah

- Kemudahan investasi merupakan peluang bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Rembang, mengingat masih adanya pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangunan industri.
- Masih terbukanya pengembangan dan pembangunan kawasan industri. Dengan pembangunan kawasan industri dapat

memperpendek jalur distribusi bahan baku, kemudahan transportasi dan pengawasan dan perlindungan terhadap bahaya pencemaran akibat limbah yang dihasilkan. Selain itu dengan pengembangan kawasan industri akan memperluas pusat pertumbuhan suatu kawasan sebagai akibat daya tarik menarik antar wilayah.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Tersediannya tenaga kerja dengan upah yang relative rendah

3. Aspek Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasa depan akan memudahkan dan meningkatkan produksi serta pemanfaatan rekayasa teknologi praktis untuk pelaku usaha kecil, sehingga proses produksinya akan lebih efisien dan efektif.

4. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya

- Semakin banyak perbankan dan lembaga keuangan yang menawarkan program pinjaman bagi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit guna menambah modal usahanya.
- Peningkatan infrastruktur daerah sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian daerah. Semakin mudahnya akses jalan dan sarana pendukung lainnya akan memperlancar kemudahan jaringan usaha, distribusi barang serta kemudahan komunikasi antar daerah sehingga membuka peluang usaha semakin menyebar keluar daerah.
- Terbukanya peluang pasar ekspor ke negara lain terutama sebagai dampak adanya pasar bebas yang memberikan keleluasaan dan menjamin kebebasan pelaku usaha untuk memasarkan produknya.

Urusan Tenaga Kerja Beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam urusan ketenagakerjaan di

Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut;

1. Jumlah pengangguran di Kabupaten Rembang masih relative tinggi meskipun dari tahun ketahun angka pengangguran semakin menurun, namun tetap membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja
2. Peningkatan kualitas dari pencari kerja untuk bisa mengisi lowongan-lowongan kerja yang tersedia
3. Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja di dalam negeri maupun di Luar Negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/Pelaku usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja
4. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja terampil/kompetensi sesuai dengan keahlian sektor perusahaan/industry sedangkan pelatihan kerja yang dilaksanakan belum mengacu pada kebutuhan pasar/pengguna tenaga kerja.
5. Masih terdapat 55% perusahaan di Kabupaten Rembang yang belum mempunyai peraturan perusahaan, sehingga perlu untuk meningkatkan kesadaran pengusaha untuk membuat peraturan perusahaan
6. Rendahnya tingkat perlindungan dan pengawasan terhadap Kesehatan dan perlindungan tenaga kerja
Adapun peluang yang ada untuk dapat meningkatkan urusan tenaga kerja di Kabupaten Rembang antara lain;
 1. Pemerintah mencanangkan zero domestic worker untuk pengiriman TKI ke Luar Negeri pada tahun 2017
 2. Peluang kesempatan kerja antar daerah dan adanya kebijakan Pemerintah mengenai KUR guna pengembangan kewirausahaan/UMKM
 3. Tersedia jabatan – jabatan dalam dunia kerja yang membutuhkan kompetensi khusus/tertentu serta

persaingan tenaga kerja semakin kompetitif

4. Jumlah perusahaan besar dan menengah memadai untuk mendukung program pemagangan serta perusahaan yang memahami program pemagangan terbatas sehingga yang bersedia mendukung masih rendah.
5. Adanya regulasi terkait pelaksanaan peraturan dibidang norma ketenagakerjaan bagi pengusaha atau pemberi kerja
6. Adanya program nasional dan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pengawasan norma kerja perempuan dan anak yaitu pengurangan pekerja anak/ anak yang bekerja yang dikembalikan ke dunia Pendidikan dengan penarikan pekerja anak dikembalikan ke dunia sekolah.
7. Adanya standarisasi dan sertifikasi K3 ditempat kerja bagi perusahaan yang menggunakan mesin dan peralatan, serta pencanangan tahun 2015 Indonesia berbudaya K3
8. Adanya dukungan kebijakan dari segi program dan penganggaran yang responsif gender (ARG)

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang melaksanakan tugas untuk urusan perindustrian dan tenaga kerja di Kabupaten Rembang. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan layanan dan fasilitas yang ada kaitannya dengan segala urusan perindustrian dan tenaga kerja untuk masyarakat Kabupaten Rembang. Urusan pilihan perindustrian dilaksanakan oleh bidang pembangunan sumber daya industri dan bidang pengendalian dan sistem informasi industri sedangkan urusan pilihan tenaga kerja dilaksanakan oleh bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang sesuai dengan urusan kewenangannya adalah sebagai berikut :

Bidang Urusan	Usulan Permasalahan	Tindak Lanjut
Perindustrian	1. Belum optimalnya pertumbuhan industri dan penerapan inovasi teknologi industri yang berdaya saing	Mengadakan program perencanaan dan pembangunan industri
	2. Kurangnya informasi perusahaan industri atas ketentuan industri	Mengadakan program pengelolaan dan pengendalian sistem informasi

		industri nasional
Tenaga Kerja	1. Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah	Mengadakan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
	2. Belum optimalnya sistem informasi (market place) ketenagakerjaan, serta masih rendahnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki	Mengadakan program penempatan tenaga kerja
	3. Belum optimalnya perusahaan yang taat peraturan dan masih kurangnya koordinasi lembaga kerja sama tripartit	Mengadakan program hubungan industrial

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2026. Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu:

“MEWUJUDKAN REMBANG GEMILANG 2026”

Rembang Gemilang 2026 merupakan kondisi Masyarakat Kabupaten Rembang yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Visi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan publik yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016- 2021 sebagai berikut:

1. Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang semakin Berkualitas dan Terproteksi Jaminan Sosial.
3. Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang berhubungan kuat dengan tugas pokok dan fungsi Dinperinnaker Kabupaten Rembang adalah Misi 1 dan 2. Adapun tujuan, sasaran dan strategi Kabupaten Rembang yang terkait dengan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Misi kesatu yaitu Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi atau tertuang dalam jargon “Apik Layanane” berfokus pada 2 (dua) program, yaitu Program Digitalisasi Birokrasi dan Program Rembang Smart City.

Dua program tersebut akan diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a) APIK DESAKU (Akses Pemanfaatan Internet dan

- Komunikasi), dengan memberikan akses gratis pada publik guna menunjang aktivitas warga desa yang membutuhkan koneksi internet, dan Pelayanan masyarakat berbasis IT sampai ke desa.
- b) Penyederhanaan layanan (Ora ribet birokrasiku), dengan penyederhanaan layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
 - c) Keterbukaan informasi (Gamblang pemerintahku), memberikan kemudahan informasi serta pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah berbasis digital.
2. Misi kedua yaitu Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang semakin Berkualitas dan Terproteksi Jaminan Sosial atau dalam jargon “Mumpuni dan Sehat Wargane”, berfokus pada 5 (lima) program yang salah satunya berkaitan erat dengan Dinperinnaker, yaitu Program Cipta Kerja. Program Cipta Kerja akan diwujudkan dalam bentuk Peningkatan Lapangan Kerja

3.3 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Ketenagakerjaan, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Renstra Kementerian Perindustrian

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yang juga merupakan Visi Kementerian Perindustrian adalah “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”. Sudut pandang sektor industri atas Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah dengan mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga mampu

bersaing dengan negara lainnya.

9 (Sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 juga merupakan misi Kementerian Perindustrian, yaitu:

- a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- c) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- g) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman ke setiap warga.
- h) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- i) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan industri,

Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri tahun 2020-2024 yaitu “*Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional*”. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga merupakan indikator kinerja utama, yaitu:

Target Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja Utama	Target	Target
	2020	2024
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non migas (%)	5,3	8,4
Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non migas (%)	17,8	18,9
Tenaga Kerja di Sektor Industri (juta orang)	19,2	22,5

Nilai Ekspor Industri Pengolahan Non migas (US milliard dollar)	133,1	181,6
---	-------	-------

Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian RI (2020)

3.4 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Sasaran utama pembangunan bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah :

1. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka mewujudkan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan". Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut:
2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dilaksanakan dengan strategi:
 - a) meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi;
 - b) meningkatkan produktivitas pekerja;
 - c) meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
 - d) meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan
 - e) melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
 - f) meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan;
 - g) meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
 - h) menyusun standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja;

i) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pelatihan dan produktivitas.

3. Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi:

a) meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri;

b) meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;

c) meningkatkan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja;

d) meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis

e) melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayeuian perizinan yang transparan dan akuntabel;

f) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan penempatan dan meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja penempatan tenaga kerja dalam negeri.

g) Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhanpenerapan norma ketenagakerjaan. Upaya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan strategi: 1) meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan

- penyidikan norma Ketenagakerjaan; 2) meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; 3) meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak; 4) meningkatkan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja; 5) meningkatkan kualitas dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja; 6) menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja; 7) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan;
- h) Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan. Upaya pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi: 1) meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial; 2) meningkatkan penerapan kebijakan tentang pengupahan serta struktur dan skala upah; 3) meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 4) meningkatkan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja; 5) meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan; 6) peningkatan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.
- i) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan sasaran program

meningkatkan kapasitas, kinerja organisasi dan pelayanan internal. Upaya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara: 1) meningkatkan pelayanan perencanaan untuk mendukung kinerja dan akuntabilitas kementerian yang lebih baik; 2) meningkatkan tata kelola keuangan kementerian; 3) meningkatkan manajemen organisasi dan aparatur; 4) meningkatkan kualitas penyusunan dan penataan perundang-undangan; 5) meningkatkan kepuasan pengguna layanan umum dan pengelolaan arsip Kementerian Ketenagakerjaan; 6) meningkatkan tindak lanjut atas keaja sama luar negeri; 7) meningkatkan kemudahan akses, keterbukaan dan pelayanan informasi publik; 8) meningkatkan SDM Kementerian Ketenagakerjaan yang kompeten sesuai dengan Rencana Pengembangan SDM; 9) meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang Ketenagakerjaan.

- j) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengawasan internal dalam mendukung good governance di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Upaya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara: 1) mewujudkan pengawasan Inspektorat I yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; 2) mewujudkan pengawasan Inspektorat II yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan

tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur dilingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; 3) mewujudkan pengawasan Inspektorat III yg memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; 4) mewujudkan pengawasan Inspektorat IV yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; 5) meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal Inspektorat Jenderal.

- k) Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan secara elektronik. Perencanaan, penelitian dan pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara: 1) meningkatkan nilai indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) Kementerian Ketenagakerjaan; 2) meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja; 3) meningkatkan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan; 4) menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan terkini; 5) meningkatkan hasil penelitian, dan kajian serta model yang bermanfaat; 6) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

3.5 Telaah Renstra Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 3 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor:64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Berangkat dari telaahan dan kondisi ketenagakerjaan, maka dirumuskan isu-isu strategis kedepan yaitu:

1. Tingginya Angka Pengangguran
2. Rendahnya Keterampilan Tenaga Kerja
3. Rendahnya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja
Program-program unggulan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - a) Memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi dengan mengedepankan keterbukaan sekaligus membangun komunikasi dua arah, secara rutin menggelar dialog dengan masyarakat.
 - b) Mewujudkan Desa Mandiri, dengan Menggali dan mengembangkan sumber daya potensial kawasan perdesaan; pembimbingan dan pendampingan untuk usaha mikro, kecil dan menengah melalui kredit perbankan dengan pola dana penjaminan.
 - c) Peningkatan kesejahteraan Buruh dengan: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Pekerja; Meningkatkan upah minimum buruh; dan Memfasilitasi hunian yang layak untuk buruh.
 - d) Meningkatkan Kedilan Gender dan Perlindungan Anak, dengan memastikan perspektif (sudut

pandang) gender digunakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan penerbitan kebijakan publik; Meningkatkan keterdidikan gender masyarakat pada berbagai sektor kehidupan; Menguatkan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender serta perlindungan anak.

- e) Infrastruktur dan Sarana Transportasi, dengan membangun infrastruktur yang sesuai dan berdaya guna serta melakukan modernisasi sistem dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas.

3.6 Telaah Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah;

1. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah dengan sasaran meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri
2. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah dengan sasaran meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan.

Arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 meliputi;

1. Peningkatan daya saing produk industri
2. Pengembangan industri pengolahan
3. Peningkatan dukungan penguatan SDM industri
4. Pengembangan penguasaan teknologi dan inovasi
5. Penguatan pasokan bahan baku industri
6. Peningkatan koordinasi lintas sektor
7. Pengembangan perwilayahan industri yang inklusif, menyebar dan berkualitas melalui pendekatan georegional industri yang berwawasan lingkungan

8. Peningkatan fungsi fasilitas jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing
9. Penyediaan informasi pasar dan menangkap arah perdagangan ke depan

Strategi yang dipakai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah;

1. Peningkatan produksi dan produktifitas usaha dan IKM melalui;
 - a. Pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap tenaga kerja
 - b. Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri
 - c. Pengembangan inovasi teknologi produksi
 - d. Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran dan standarisasi produk
 - e. Pengembangan bahan baku industri substitusi impor
 - f. Integritas sektor pendukung urusan industry
2. Perluasan pasar ekspor nontradisional
3. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
4. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa

Tabel 3.6
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Urusan Industri dan Perdagangan
Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	Pertumbuhan laju sektor industri	4,85%	5,10%	5,35%	5,65%	5,85%
Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan	Pertumbuhan laju sektor perdagangan	6,98%	7,32%	7,76%	8,20%	8,64%

Sumber Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pro. Jawa Tengah (2018)

3.7 Penentuan Isu-isu strategis

Berangkat dari telaah kondisi Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Rembang baik dari tantangan dan peluang, maka dirumuskan isu-isu strategis kedepan yaitu;

1. Urusan Bidang Perindustrian
 - a) Masih rendahnya produk IKM yang memenuhi standarisasi
 - b) Belum optimalnya inovasi teknologi industri
 - c) Belum meratanya persebaran industri di Kabupaten Rembang
 - d) Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri yang meliputi pengelolaan lingkungan, Kawasan industry lahan industri dan prasarana penunjang
 - e) Belum optimalnya keterbukaan sektor industri dengan sector lainnya
 - f) Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor

2. Urusan Bidang Tenaga Kerja
 - a) Tingginya angka pengangguran
 - b) Rendahnya keterampilan tenaga kerja
 - c) Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 merupakan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perindustrian dan tenaga kerja di Kabupaten Rembang. Ada dua tujuan yang ingin diwujudkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang yaitu:

A. Tujuan

1. Meningkatnya kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin
Indikator Tujuan: Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Meningkatnya pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Otonomi Daerah.
Indikator Tujuan : Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

B. Sasaran

1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal
Indikator Sasaran : Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal
 2. Meningkatnya Usaha Industri
Indikator Sasaran : Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri
- Tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2022-2026 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinperinnaker Kabupaten Rembang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				(5)	(6)	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,83	3,67	4,75	4,6	4,5	4,3	4,0
	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	%	4	NA	5	7	10	12	15
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	-1,45	4,23	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
	Meningkatnya Usaha Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Trilyun Rupiah	3,105	3,2	3,15	3,18	3,2	3,23	3,25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang meraih tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinperinnaker Kabupaten Rembang disajikan dalam tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINPERINNAKER

Visi : “Rembang Gemilang 2026”			
MisiIII : “Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”			
Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatnya Usaha Industri	<p>Pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap tenagakerja</p> <p>Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri</p> <p>Pengembangan inovasi teknologi produksi</p> <p>Standarisasi produk IKM</p> <p>Pengembangan bahan baku industri substitusi impor</p> <p>Integrasi sektor pendukung industry</p>	<p>Pengembangan industri pengolahan dan Peningkatan dukungan penguatan SDM industri</p> <p>Peningkatan daya saing produk industri</p> <p>Pengembangan, penguasaan teknologi dan inovasi</p> <p>Fasilitasi Standarisasi produk IKM</p> <p>Penguatan pasokan bahan baku industri</p> <p>Peningkatan koordinasi lintas sektor</p>
Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	<p>Perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja</p> <p>Pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan</p>	<p>Memperluas bursa tenaga kerja dan wirausaha serta mengembangkan kelembagaan, pelatihan sertifikasi kompetensi, produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja</p> <p>Meningkatkan dan membina kewirausahaan pemuda secara sinergis dengan segenap pemangku kepentingan terkait</p> <p>Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana kepemudaan</p>

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi menyesuaikan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang

Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21	
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					8.216.441.000		8.221.441.000		8.226.441.000		8.231.441.000		8.231.441.000		8.231.441.000			
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.935.614.000		7.940.614.000		7.945.614.000		7.950.614.000		7.950.614.000		7.950.614.000			
		2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.935.614.000		7.940.614.000		7.945.614.000		7.950.614.000		7.950.614.000		7.950.614.000	Sekretariat	Kab. Rembang	
		2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Angka	70	70	6.640.314.000	71	6.645.314.000	72	6.650.314.000	73	6.655.314.000	74	6.655.314.000	74	6.655.314.000	Sekretariat	Kab. Rembang	
				IKM	Angka	80,70	80,70		81,99		82,56		83,69		84,14		84,14		Sekretariat	Kab. Rembang	
		2 7 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	%	90	90	644.000.000	91	644.000.000	92	644.000.000	93	644.000.000	94	644.000.000	94	644.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang	
		2 7 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	616.500.000	2	616.500.000	2	616.500.000	3	616.500.000	3	616.500.000	3	616.500.000	Sekretariat	Kab. Rembang	
		2 7 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
		2.7.1.2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2.7.1.2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0	0	0	0	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2.7.1.2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12	17.500.000	12	17.500.000	12	12.500.000	12	12.500.000	12	12.500.000	12	12.500.000	12	12.500.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2.7.1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	%	95	95	5.338.398.000	95,5	5.338.398.000	96	5.338.398.000	96,5	5.338.398.000	97	5.338.398.000	97	5.338.398.000	97	5.338.398.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2.7.1.2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	50	5.220.448.000	50	5.220.448.000	50	5.220.448.000	50	5.220.448.000	50	5.220.448.000	50	5.220.448.000	50	5.220.448.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2.7.1.2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	115.950.000	12	115.950.000	12	115.950.000	12	115.950.000	12	115.950.000	12	115.950.000	12	115.950.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2.7.1.2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2.7.1.2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21
				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
		2 7 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik	%	95	95	1.500.000	95	1.500.000	95	1.500.000	95	1.500.000	95	1.500.000	95	1.500.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1 2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1 2.05	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1 2.05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1 2.05	5 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	%	100	100	165.266.000	100	165.266.000	100	165.266.000	100	165.266.000	100	165.266.000	100	165.266.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	30	49.280.000	30	49.280.000	30	49.280.000	30	49.280.000	30	49.280.000	30	49.280.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21		
		2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	11.486.000	12	11.486.000	12	11.486.000	12	11.486.000	12	11.486.000	12	11.486.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2	7	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	16.500.000	12	16.500.000	12	16.500.000	12	16.500.000	12	16.500.000	12	16.500.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2	7	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur	%	95	95	50.000.000	95	50.000.000	95	50.000.000	95	50.000.000	95	50.000.000	95	50.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2	7	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	50.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	389.150.000	100	389.150.000	100	389.150.000	100	389.150.000	100	389.150.000	100	389.150.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21	
		2 7 1	2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1	2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	259.650.000	12	259.650.000	12	259.650.000	12	259.650.000	12	259.650.000	12	259.650.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara dengan baik	%	100	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1	2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11	25.000.000	11	25.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1	2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
		2 7 1	2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	Sekretariat	Kab. Rembang
Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin					Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,83	4,75		4,6		4,5		4,3		4,0		4,0			
	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal				Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	%	4	5		7		10		12		15		15			
		2 7 2		PROGRAM PERENCANAAN	Cakupan laporan data	%	5	15	50.000.000	30	50.000.000	50	50.000.000	80	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Bidang	Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21
			TENAGA KERJA	base tenaga kerja yang dikelola dengan baik															P3TK	Rembang
		2 7 2 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase peningkatan database tenaga kerja	%	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 2 2.01 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 2 2.01 2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	45	50	1.500.000.000	55	1.500.000.000	60	1.500.000.000	65	1.500.000.000	70	1.500.000.000	70	1.500.000.000	UPT BLK	Kab. Rembang
		2 7 3 2.01	Pelaksanaan berdasarkan Kompetensi	Jumlah paket pelatihan unit	Paket	NA	35	1.400.000.000	40	1.250.000.000	45	1.250.000.000	50	1.250.000.000	55	1.250.000.000	55	1.250.000.000	UPT BLK	Kab. Rembang
				Jumlah kompetensi unit	Unit	NA	617		698		779		860		941		941			Kab. Rembang
		2 7 3 2.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	218	232	1.400.000.000	248	1.250.000.000	264	1.250.000.000	280	1.250.000.000	296	1.250.000.000	296	1.250.000.000	UPT BLK	Kab. Rembang
		2 7 3 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional	Lembaga	2	2	100.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 3 2.02 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	2	2	100.000.000	5	100.000.000	8	100.000.000	11	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 3 2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Lembaga Pelatihan kerja yang memiliki perizinan	Lembaga	0	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 3 2.03 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Unit	0	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 3 2.04	Konsultasi Produktivitas	Jumlah Perusahaan	Unit	0	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Bidang	Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21		
				pada Perusahaan Kecil	yang menerapkan program peningkatan produktivitas																P3TK	Rembang		
		2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Unit	0	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	0	0	0	10	50.000.000	20	50.000.000	30	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dok	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	30	35	150.000.000	40	150.000.000	45	150.000.000	50	150.000.000	55	150.000.000	55	150.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2	7	4	2.01		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi pelayanan antar kerja	Keg	1	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan/ lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	3	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	0	0	0	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	30	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	15	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program	Orang	15	15	15.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21
				Perluasan Kesempatan Kerja																
		2 7 4 2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS	Lembaga	15	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 4 2.02	1 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 4 2.02	2 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 4 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja	Informasi	5	5	50.000.000	6	50.000.000	10	50.000.000	15	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
			1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		0	0	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 4 2.03	2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	20	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 4 2.03	3 Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Orang	0	0	20.000.000	0	20.000.000	1000	20.000.000	1500	20.000.000	1500	20.000.000	1500	20.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 4 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja PMI yang terfasilitasi	Orang	20	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang
		2 7 4 2.04	1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	20	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	Bidang P3TK	Kab. Rembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21
		2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	% perusahaan yang taat aturan	%	40	50	250.000.000	57	250.000.000	65	250.000.000	72	250.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	Bidang Hubungn Industri	Kab. Rembang
		2 7 5 2.01	Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan	Badan Usaha		50	145.000.000	50	145.000.000	50	145.000.000	50	145.000.000	50	145.000.000	50	145.000.000	Bidang Hubungn Industri	Kab. Rembang
		2 7 5 2.01 1	Pengesahan Peraturan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	15	15	45.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	Bidang Hubungn Industri	Kab. Rembang
		2 7 5 2.01 2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	5	5	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		
		2 7 5 2.01 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Bidang Hubungn Industri	Kab. Rembang
		2 7 5 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan	Perusahaan	50	50	105.000.000	50	105.000.000	50	105.000.000	50	105.000.000	50	105.000.000	50	105.000.000	Bidang Hubungn Industri	Kab. Rembang
		2 7 5 2.02 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	50	50	50.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	Bidang Hubungn Industri	Kab. Rembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21
				Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
		2 7 5 2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara yang Terselamatkan	Perkara	5	5	0	5	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	Bidang Hubungn Industri	Kab. Rembang	
		2 7 5 2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	10	10	20.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	Bidang Hubungn Industri	Kab. Rembang	
		2 7 5 2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1	35.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Bidang Hubungn Industri	Kab. Rembang	
		2 7 5 2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	12.520	13.100	0	13.800	20.000.000	14.500	20.000.000	15.200	20.000.000	16.000	20.000.000	16.000	20.000.000	Bidang Hubungn Industri	Kab. Rembang	
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah					Pertumbuhan Sektor Pengolahan PDRB Industri	%	-1,45	0,5		1,0		1,5		2,0		2,5		2,5				
	Meningkatnya Usaha Industri				Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Angka	3,105	3,15		3,18		3,2		3,23		3,25		3,25				
		3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						280.827.000		280.827.000		280.827.000		280.827.000		280.827.000		280.827.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21		
		3.3.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					280.827.000		280.827.000		280.827.000		280.827.000		280.827.000		280.827.000				
		3.3.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan usaha industry	%	1,25	2,5	800.000.000	3,0	800.000.000	3,5	800.000.000	4,0	800.000.000	4,5	800.000.000	4,5	800.000.000	Bidang Perencanaan Pembangunan Industri	Kab. Rembang		
		3.3.1	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Industri yang Didampingi Usahanya	Usaha	250	250	800.000.000	250	800.000.000	250	800.000.000	250	800.000.000	250	800.000.000	250	800.000.000	Bidang perencanaan dan pembangunan industri	Kab. Rembang	
		3.3.1	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Bidang Perencanaan Pembangunan Industri	Kab. Rembang
		3.3.1	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	Bidang Perencanaan Pembangunan Industri	Kab. Rembang
		3.3.1	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Bidang Perencanaan Pembangunan Industri	Kab. Rembang
		3.3.1	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Bidang Perencanaan Pembangunan Industri	Kab. Rembang
		3.3.1	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	Bidang Perencanaan Pembangunan Industri	Kab. Rembang
		3.3.1	201	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Bidang Perencanaan	Kab. Rembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21	
				Rencana Pembangunan Industri	Rencana Pembangunan Industri																	Pembangunan Industri	
		3.3.1		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	% usaha industri yang memiliki ijin usaha	%	4,5	9,5	40.000.000	15	40.000.000	20	40.000.000	25	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	Bidang Pengendalian Izin Usaha Industri	Kab. Rembang
		3.3.1	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri sesuai SOP	Unit	51	51	40.000.000	56	40.000.000	61	40.000.000	66	40.000.000	71	40.000.000	71	40.000.000	71	40.000.000	Bidang Pengendalian Izin Usaha Industri	Kab. Rembang
		3.3.1	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	50	50	25.000.000	50	25.000.000	55	25.000.000	55	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	Bidang Pengendalian Izin Usaha Industri	Kab. Rembang	
		3.3.1	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	20	20	15.000.000	25	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	35	15.000.000	35	15.000.000	Bidang Pengendalian Izin Usaha Industri	Kab. Rembang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	-21
		334	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	%usaha industri yang masuk database	%	45	50	65.000.000	55	65.000.000	60	65.000.000	65	65.000.000	70	65.000.000	70	95.000.000	Bidang Pengelolaan System Informasi Industry Nasional	Kab. Rembang
		334.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Database Industri	Database	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	Bidang Pengelolaan System Informasi Industry Nasional	Kab. Rembang
				Jumlah Laporan Data Industri yang Dikelola Dengan Baik	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Bidang Pengelolaan System Informasi Industry Nasional	Kab. Rembang
		334.2.01.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Bidang Pengelolaan System Informasi Industry Nasional	Kab. Rembang
		334.2.01.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Bidang Pengelolaan System Informasi Industry Nasiona	Kab. Rembang
		334.2.01.3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Bidang Pengelolaan System Informasi Industry Nasiona	Kab. Rembang

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Atas wewenang dan urusan yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, ada 2 (dua) Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD selama 5 (lima) tahun (tahun 2021-2026) dengan target dari kedua indikator kinerja tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel 7.1. sebagai berikut;

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rembang yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,83	NA	4,75	4,6	4,5	4,3	4,0	4,0
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	-1,45	NA	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	2,5

Sedangkan dalam rangka mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026, ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun (tahun 2021-2026) dengan target capaian dari ketiga Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagaimana tersaji dalam table 7.2. sebagai berikut;

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	%	4	NA	5	7	10	12	15	15
2	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Angka	3,105	NA	3,15	3,18	3,2	3,23	3,25	3,25

Adapun dalam rangka mengukur ketercapaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026 diberikan Penjelasan (Formulasi / Rumus Perhitungan) Sumber Data dan SKPD/Unit SKPD Penanggung jawab ketercapaian dan ketersediaan data tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel 7.3. sebagai berikut:

Tabel 7.3.

Formulasi/Rumusan Perhitungan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DINPERINNAKER Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan (Formulasi / Rumus Perhitungan)		Sumber Data	Penanggung jawab
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Sumber Data Publikasi BPS pada Buku Kabupaten Rembang dalam Angka atau Situs Resmi BPS		BPS	Bidang P 3 TK & UPT BLK
2	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	%	$\frac{\text{Serapan Tenaga Kerja Th}(n) - \text{Serapan Tenaga Kerja Th}(n-1)}{\text{Serapan Tenaga Kerja Th}(n-1)}$	X 100 %	Dinperinnaker	Bidang P 3 TK & UPT BLK
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	Sumber Data Publikasi BPS pada Buku Kabupaten Rembang dalam Angka atau Situs Resmi BPS		BPS	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Bidang Pengendalian & Sistem Informasi Industri, Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial
4	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Angka (Trilyun Rupiah)	Sumber Data Publikasi BPS pada Buku Kabupaten Rembang dalam Angka atau Situs Resmi BPS		BPS	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Bidang Pengendalian & Sistem Informasi Industri, Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial

Sedangkan dalam rangka mengukur ketercapaian Indikator Kinerja Program pada DINPERINAKER Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 diberikan Penjelasan (Formulasi / Rumus Perhitungan) Sumber Data dan SKPD/ Unit SKPD Penanggung jawab ketercapaian dan ketersediaan data tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel 7.4. sebagai berikut;

Tabel 7.4.

Formulasi/Rumusan Perhitungan Indikator Kinerja Program (*outcome*) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026

Kode			PROGRAM	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Penjelasan (Formulasi / Rumus Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung jawab
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan laporan data base tenagakerja yang dikelola dengan baik	%	$\frac{\text{Jumlah Data base yang dikelola dengan baik}}{\text{Jumlah Data base Ketenagakerjaan}} \times 100 \%$	Dinperinnaker	Bidang P3TK
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Tahun (n) - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Tahun (n - 1)}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Tahun (n - 1)}} \times 100 \%$	Dinperinnaker	Bidang P3TK & UPT BLK
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja}} \times 100\%$	Dinperinnaker	Bidang P3TK
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	% perusahaan yang taat aturan	%	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yg memenuhi syarat kerja \& jamsos tenaga kerja}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	Dinperinnaker	Bidang Hubungan Industrial
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan usaha industry	%	$\frac{\text{Jumlah usaha industry tahun n - jumlah usaha industry tahun (n-1)}}{\text{Jumlah usaha industry tahun (n - 1)}} \times 100\%$	Data Industri	Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN	% usaha industri yang memiliki ijin usaha	%	$\frac{\text{Jumlah Industri yang memiliki izin usaha}}{\text{Jumlah Industri}} \times 100\%$	Dinperinnaker	Bidang pengendalian dan system informasi

			USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					industri
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	% usaha industri yang masuk database	%	$\frac{\text{Jumlah Industri yang masuk data base}}{\text{Jumlah Industri}} \times 100\%$	Dinperinnaker	Bidang pengendalian dan system informasi industri

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 harus dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021 -2026.
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang pembangunan sumber daya industri, bidang pengendalian dan sistem informasi industri, bidang pembinaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan yang terkait dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan perindustrian dan tenaga kerja di Kabupaten Rembang.

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG



Ir. JOESTIENNARNI, M.T
NIP. 19620922 199003 2 003

